



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSI HARI
2. Jabatan : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
3. NHK : 458869

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.745.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/150 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.370.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m²/120 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 467.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SPORTER Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 200.852.921**F. HARTA LAINNYA** Rp. 2.500.000**Sub Total** Rp. 3.437.352.921**III. HUTANG** Rp. 77.901.300**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.359.451.621**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.